

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FAHMI PALU

THE IMPLEMENTATION OF NO SMOKING AREA ON EMPLOYEES IN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FAHMI PALU

¹Firmansyah, ²Sudirman, ³Herlina Yusuf

^{1,2,3}*Bagian AKK, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email: Firmansyah.fkm96@gmail.com)

(Email: Sudirman.aulia@gmail.com)

(Email : Herlinayusuf16@gmail.com)

ABSTRAK

Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya pada bangsa kita. Remaja, dewasa bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut. Pelarangan untuk merokok memang tidak bersifat baku, hanya saja yang ditekankan adalah tidak merokok di tempat umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fahmi Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu merupakan metode penelitian yang dilakukan membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan, dimana penggambaran atas datanya dengan menggunakan kata dan baris kalimat, dengan 9 informan, dimana informan kunci merupakan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu, penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 02 April 2019 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu. Dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat disimpulkan bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu, belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki seperti belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga baik aparat pelaksana maupun masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Di sarankan kepada pelaksana untuk menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Sekolah

ABSTRACT

Smoking habits have become a culture in our nation. Teenagers, adults and even children are familiar with the deadly object. The prohibition of smoking is indeed not standard, except that what is emphasized is not smoking in public areas. The purpose of this research is to find out the implementation of the no smoking area policy for employees in Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu environment. This research uses a qualitative-descriptive approach, which is a research method conducted to draw a description of a situation, where the description of the data using words and sentence lines. This research involves 9 informants. The key informant is the Principal the school. This research was conducted on April 2, 2019. From the results of research, it is concluded that the school policy has not been effective and there are many obstacles in its implementation that still need to be improved such as the maximum extent of

socialization so that both the apparatus and the society do not know their tasks, functions and respective roles. It is suggested to the implementer to enforce the rule because it is as a regional legal product that has been established must be upheld in achieving the stated goals.

Keywords : *Implementation, No Smoking Areas, and School*

PENDAHULUAN

Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia masih menimbulkan perdebatan yang panjang. Kawasan yang bebas dari asap rokok merupakan satu-satunya cara efektif dan murah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. (Zulaeha, 2015).⁽¹⁾

Masalah tentang rokok merupakan suatu masalah yang tidak pernah bisa tuntas jika dibahas penanganannya sebab ia dibutuhkan bagi oleh sebagian orang akan tetapi ia juga menyimpan bahaya dan dapat mengakibatkan kematian jika kita mengkonsumsinya. Bahkan merokok sekarang telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Berdasarkan data WHO tahun 2013 jumlah perokok aktif di dunia adalah sebanyak 2,3 miliar orang dan Indonesia berada di urutan ketiga di dunia setelah Cina dan India. Total perokok di Indonesia sebanyak 0,5 juta jiwa. (Haifa Nurdiannah,dkk, 2017).⁽²⁾

Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya pada bangsa kita. Remaja, dewasa bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut.

Pelarangan untuk merokok memang tidak bersifat baku, hanya saja yang ditekankan adalah tidak merokok di tempat umum. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok. (Haifa Nurdiannah,dkk, 2017).⁽³⁾

Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 perilaku merokok penduduk 15 tahun keatas masih belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, cenderung meningkat dari 34,2% tahun 2007 menjadi 36,3% tahun 2013. 64,9% laki-laki dan 2,1% perempuan masih menghisap rokok tahun 2013. Di temukan 1,4% perokok umur 10-14 tahun, 9,9% perokok pada kelompok tidak bekerja.⁽⁴⁾

Implementasi adalah yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi kebijakan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta

memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif. (Kennedi Tampubolon, dkk, 2013).⁽⁵⁾

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat di tekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan di lakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak di perhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang di harapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu, adalah suatu lembaga pendidikan dasar yang tamatnya tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saja, namun didasari dengan kecerdas spiritual atau keagamaan. Sesuai visi dan misinya yaitu menyelenggarakan

pendidikan islam yang menapak tilasi sistem pendidikan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu persiapannya adalah peningkatan pengetahuan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok, agar dapat meningkatkan produktivitas kerja pada guru dan staf, kualitas udara yang sehat dan bersih, memberikan ruang dan lingkungan sekolah yang sehat, dalam menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fahmi Palu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu merupakan metode penelitian yang dilakukan membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan, dimana penggambaran atas datanya dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Lokasi penelitian dilaksanakan di dilakukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu dan penelitian ini dilakukan pada bulan Apri 2019. Sumber informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui tentang implementasi program rekam medis. Penentuan informan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan pengambilan informan dengan cara menetapkan kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti.

HASIL

Tabel 5.1. Dari data hasil wawancara, yang telah di kumpulkan di peroleh karakteristik informan seperti pada table di bawah ini :

Informan	Umur	Pendidikan	Jabatan/ Tenaga Fungsional
RO	50	S1	Kepala Sekolah
ZF	30	S1	Guru AL-Quran
AC	35	SMA	Guru BPI
NA	33	S1	Guru Bahasa Arab
NR	33	S1	Guru PAI
YD	53	S1	Security
RW	30	SMA	Security
FR	20	SMA	Petugas Kebersihan
DH	24	SMA	Petugas Kebersihan

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 5.1 Jumlah informan terdiri dari 9 orang yaitu informan pertama ibu Rahmawati Ottoluwa, S,Sos (RO) yang juga sebagai informan kunci 50 tahun, pendidikan terakhir S1, dengan

jabatan sebagai Kepala Sekolah, Zulfikar (ZF) 30 tahun, pendidikan terakhir S1, Jabatan sebagai guru Al-Quran, Ahmad Aco (AC) 35 tahun pendidikan terakhir SMA, jabatan sebagai Guru BPI, Nur Alam (NA) 33 tahun pendidikan terakhir S1, jabatan sebagai Guru Bahasa Arab, Naufal Abdurahman (NR) 33 tahun, pendidikan terakhir S1, jabatan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam dan sebagai HUMAS, Yudi (YD) 53 tahun, pendidikan terakhir S1, jabatan sebagai ketua security, Riswanto (RW) 30 tahun, pendidikan terakhir SMA, jabatan sebagai security, Fahrul (FR) 20 tahun, pendidikan terakhir SMA, jabatan sebagai petugas kebersihan, Dino Hadimu (DH) 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, jabatan sebagai petugas kebersihan.

PEMBAHASAN

Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu nomor 3 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III : Yakni komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III erlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk

menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Dalam hal ini pimpinan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi telah menghimbau kepada seluruh guru-guru, maupun semua staff yang bekerja dilingkungan sekolah dasar Islam Terpadu Al-fahmi, harus menerapkan kebijakan dari Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sejak didirikannya sekolah tersebut, meskipun berdasarkan hasil wawancara belum diadakan sosialisasi dari pemerintah

daerah itu sendiri mengenai kawasan tanpa rokok.

Menurut Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Sumberdaya juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Hasil yang ditemukan berdasarkan wawancara dari beberapa informan bahwa didalam lingkungan sekolah tidak disediakan tempat khusus untuk merokok, dan seluruh

guru maupun staff yang berkerja di lingkungan sekolah dasar islam terpadu Al-fahmi menjadi pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok. Apabila melihat siapa saja yang merokok dilingkungan sekolah harus secepatnya menegur agar tidak merokok dilingkungan sekolah. Sekolah dasar islam terpadu Al-fahmi juga telah menyediakan infrastruktur berupa dengan menempel beberapa pamphlet larangan untuk merokok di beberapa tempat dalam lingkungan sekolah.

Yakni watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Edward III mengemukakan disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka

terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai pelaku yang selalu melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu bukan dari pihak sekolah dasar Islam Terpadu Al-fahmi Palu, melainkan orang tua santri yang hendak mengantar ataupun menjemput. Dalam pelaksanaannya, seluruh pegawai yang berkerja dalam lingkungan sekolah menjadi pelaksana dalam memberikan teguran secara halus kepada orang tua santri yang merokok agar tidak merokok didalam lingkungan sekolah. Kalaupun ada guru/staff yang kedapatan melanggar aturan tersebut, akan diberikan teguran pertama agar sedapat mungkin tidak merokok di dalam lingkungan sekolah. Apabila selanjutnya masih dilanggar akan diberikan sanksi yang serius misalnya diberhentikan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operasional

Prosedur (SOP). Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian serta pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Pegawai Di Lingkungan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fahmi Palu, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah sebagai berikut : Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang masih

harus diperbaiki. Komunikasi, belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga baik aparat pelaksana maupun masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran kepada pelaksana untuk menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Adminitrasi Publik , Vol 1, No 1.
- Arifin, Z. (2016). *Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Riau*. JOM Fisip, Vol 3, No 2.
- Adnani, H. (2011). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Medika Yogyakarta.
- Heni Trisnowati, S. (2016). *optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok*. Jurnal Medika respati Vol XI, No 1.
- Haifa Nurdiannah,dkk, (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Sopir Bus Akap di Terminal Terboyo Kota Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 5, No 1.
- Haedar (2015). *Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*. Jurnal Katalogis, Vol 3, No 5.
- Herwinda Kurniasih, B. W. (2016). *Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Tentang Upaya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 4, No 3.
- Kennedi Tampubolon, d. (2013). *Implementasi Data Mining Algoritma Apriori Pada Sistem Persediaan Alat-alat Kesehatan* . Jurnal Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI) Vol,1, No 1.
- Nurharjadmo, W. (2008). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan* . Jurnal Spirit Publik Vol 4, No 2.
- Nasruddin Djoko Surjono, P. S. (2013). *Dampak Pendapatan dan Harga Rokok Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok Pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia* . Jurnal BPPK, Vol 6, No 2.
- Priyantining Asri Wulanningrum, E. R. (2016). *Evaluasi Penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Perguruan Tinggi Kota Semarang* . Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol 4, No 5.
- Renaldi, R. (2014). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Kesehatan vol 9, No 2.
- Rahajang, E. (2015). *Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Rokok Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali*. Jurnal Ekologi Kesehatan Vol.14 No.3.
- Taruna, Z. (2016). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6 Vol.5.

Yayi Suryo Prabandari, N. N. (2015). *Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif Pengendalian Tembakau Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku dan Status Merokok Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta* . Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.